



PENGUATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI LITERASI ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 12 SEMARANG

Darmawan, Bagus[✉], Eko Handoyo, Sunarto, Wahyu Beny

Program Studi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2022
Disetujui Maret 2022
Dipublikasikan April 2022

Keywords:

Strengthening, anti-corruption education, literacy

Abstrak

Semakin tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka penguatan pendidikan anti korupsi sangat diperlukan agar peserta didik semantias melakukan kegiatan positif yang mendukung pencegahan korupsi. Melalui literasi anti korupsi, peserta didik dapat memahami dengan lebih mudah mengenai konsep implementasi nilai-nilai anti korupsi dengan cara membaca, menulis, menyampaikan pendapatnya dan kegiatan literasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, peran sekolah, dan dampak pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi pada sikap peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di SMP Negeri 12 Semarang. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan, peran sekolah, dan dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi terhadap sikap peserta didik. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi dilakukan dengan dua bentuk yaitu pembelajaran materi sisipan dan pembiasaan literasi anti korupsi yaitu; selasa integritas, diary kejujuran, orange jus, seminar anti korupsi, dan majalah cemara. (2) Peran sekolah terbagi menjadi tugas yaitu; kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, menjadi teladan, evaluasi, kolaborasi, dan kampanye anti korupsi; wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai koordinator kegiatan peserta didik, pemantauan, pembinaan sikap, dan mendukung literasi anti korupsi; dan guru PPKn sebagai koordinator pendidikan anti korupsi, integrasi pembelajaran, pengembangan media dan stimulasi pemikiran kritis anti korupsi. (3) Dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi terhadap sikap peserta didik yaitu meningkatnya sikap kepedulian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, berani, adil, gotong royong, dan kerja keras dalam menanggapi permasalahan lingkungan sosial di SMP Negeri 12 Semarang. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran dan pembiasaan, keikutsertaan peran sekolah dalam mendukung literasi anti korupsi dapat berdampak positif terhadap sikap peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Saran peneliti (1) Dinas pendidikan Kota Semarang menginstruksikan mata pelajaran anti korupsi sendiri. (2) Sekolah membuat anggaran anggaran khusus pendidikan anti korupsi. (3) Pimpinan, guru, dan karyawan lebih konsisten memberikan contoh anti korupsi. (4) Sekolah membuat kampanye dan apresiasi dalam bentuk lomba literasi anti korupsi.

Kata Kunci: Penguatan, Pendidikan Anti Korupsi, Literasi

Abstract

Strengthening anti-corruption education is very necessary so that students always carry out positive activities that support the prevention of corruption. Through anti-corruption literacy, students can more easily understand the concept of implementing anti-corruption values by reading, writing, expressing their opinions and other literacy activities. This research aims to determine the implementation, role of schools, and the impact of anti-corruption education through anti-corruption literacy on the attitudes of students at SMP Negeri 12 Semarang. The research method used is descriptive qualitative research. The research location is at SMP Negeri 12 Semarang. The focus of this research is implementation, the role of schools, and the impact of strengthening anti-corruption education through anti-corruption literacy on students' attitudes. Data sources were obtained from primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using interviews, documentation and observation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The research results show that (1) The implementation of anti-corruption education through anti-corruption literacy is carried out in two forms, namely learning additional material and familiarizing with anti-corruption literacy, namely; Tuesday integrity, honesty diary, orange juice, anti-corruption seminar, and cypress magazine. (2) The role of the school is divided into tasks, namely; school principals as policy makers, role models, evaluations, collaborations and anti-corruption campaigns; deputy principal for student affairs as coordinator of student activities, monitoring, developing attitudes, and supporting anti-corruption literacy; and PPKn teachers as coordinators of anti-corruption education, learning integration, media development and stimulating anti-corruption critical thinking. (3) The impact of strengthening anti-corruption education through anti-corruption literacy on students' attitudes, namely increasing attitudes of caring, honesty, discipline, responsibility, courage, fairness, mutual cooperation, and hard work in responding to social environmental problems at SMP Negeri 12 Semarang. The conclusion of this research is that the implementation of learning and habituation, the role of schools in supporting anti-corruption literacy can have a positive impact on students' attitudes in implementing anti-corruption values in everyday life. Researcher's suggestions (1) The Semarang City education office instructs its own anti-corruption subjects. (2) The school creates a special budget for anti-corruption education. (3) Leaders, teachers and employees are more consistent in providing anti-corruption examples. (4) Schools create campaigns and appreciation in the form of anti-corruption literacy competitions.

Keywords: Strengthening, anti-corruption education, literacy

PENDAHULUAN

Saat ini, salah satu permasalahan terpenting yang harus diselesaikan adalah korupsi. Korupsi merupakan kejadian tahunan di hampir setiap industri dan sektor pertumbuhan di Indonesia. Menurut (Kartono, 1983) Korupsi diartikan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraup keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga orang-orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan memberikan uang pelicin (Uang sogok). Korupsi tidak lain juga disebabkan oleh munculnya karakter koruptif dalam diri seseorang selain dengan adanya peluang untuk melakukan korupsi. Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia sangat rendah. Berdasarkan hasil survei, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 76 negara (Ahsani dan Azizah, (2021). Rendahnya tingkat literasi juga mempengaruhi rendahnya tingkat literasi anti korupsi di Indonesia yang dapat ditunjukkan dengan banyaknya kasus korupsi dan suap dalam masyarakat (Ruth Meliana:2023). Menurut laporan Transparency Internasional, Indonesia memiliki skor persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada tahun 2022. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia tenggara (C. Annur: databoks: 2023). Ini menandakan bahwa tingkat tingkat korupsi di Indonesia cukup tinggi. Kemudian oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporakan bahwa potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 62,93 triliun. Angka ini meningkat 10,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga perlu adanya pengawalan secara intensif kepada masyarakat agar angka ini tidak terus meningkat.

Langkah-langkah pencegahan korupsi diperlukan karena praktik korupsi telah menyebar luas ke seluruh sektor pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi penting dan harus dilaksanakan sebagai strategi preventif. (Suyanto, 2005:43) mengartikan pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk

mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum di sekolah dengan memasukkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam pendidikan antikorupsi yang dapat diterapkan pada berbagai aktivitas pembelajaran maupun ekstra yang ada disekolahan.

Presiden Joko Widodo telah menugaskan semua lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan kementerian terkait lainnya, untuk menggabungkan pendidikan anti-korupsi ke dalam sistem pendidikan. Instruksi ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2012. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan surat edaran pelaksanaan pelatihan antikorupsi. Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1696 pada tahun 2013 yang mengatur pedoman untuk pelatihan anti-korupsi di Madrasah. Sejalan dengan Inpres nomor 2 Tahun 2014 mengenai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1969 yang membahas panduan implementasi pendidikan anti-korupsi di Madrasah, dibutuhkan pengembangan model untuk menyelaraskan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum secara bertahap atau berjenjang pada semua mata pelajaran.

Pentingnya pendidikan anti korupsi ini, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2008, ketua KPK Antasari Azhar telah membuat dan menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai tanda dimulainya kerjasama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombak masa depan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut wakil kota semarang bekerjasama dengan wakil KPK untuk mendorong upaya pencegahan korupsi sejak dini dalam pendidikan. Dimulai dengan menerbitkan Peraturan Walikota Semarang (PERWALI) Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kota Semarang.

Sekolah merupakan salah satu institusi penting dalam membentuk karakter dan sikap peserta didik. Pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk

melandu korupsi. Literasi antikorupsi merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi. Literasi anti korupsi melibatkan pemahaman tentang apa itu korupsi, dampaknya, serta cara-cara mencegah dan melawan korupsi. Literasi anti korupsi merupakan penilaian dari seberapa paham siswa memahami apa itu korupsi dan bahaya apa yang akan terjadi jika terjadi korupsi. Literasi ini mengacu pada modul yang sudah disediakan oleh KPK sebagai bahan pembelajaran bagi siswa dan guru pada satuan pendidikan. Setiap sekolah di Kota Semarang mempunyai cara tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, begitupun dengan SMP Negeri 12 Semarang. Berdasarkan hasil observasi awal SMP Negeri 12 Semarang menerapkan pendidikan anti korupsi sebagai materi dan juga praktik dalam pembentukan karakter anti korupsi kepada peserta didik. Terlaksananya pendidikan anti korupsi ini dipengaruhi oleh kebijakan kepala sekolah, guru, beserta peserta didik yang mendukung akan peraturan yang ditetapkan. Meskipun sudah diterapkannya pendidikan anti korupsi, namun masih juga ditemukan beberapa siswa yang melanggar, misalnya ketahuan mencetak, tidak jujur dalam mengembalikan barang, dan juga tidak disiplin dalam melaksanakan aturan sekolahan.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan mengenai bagaimana penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi, dampak bagi peserta didik, dan bagaimana peran sekolah dalam mendukung kegiatan literasi anti korupsi dilingkungan SMP Negeri 12 Semarang. Sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter siswa. Namun upaya penguatan lingkungan antikorupsi di sekolah masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada penguatan pendidikan antikorupsi di SMPN 12 Semarang melalui literasi anti korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian tertarik untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi khususnya lingkup SMP Negeri 12 Semarang, dengan judul yang diambil yaitu “Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang”

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang; 2) Menganalisis peran sekolah dalam melaksanakan

penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang; 3) Menganalisis dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi terhadap sikap peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang.

Adapun manfaat secara teoretis yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan penjelasan ilmiah mengenai penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di sekolah. Kemudian manfaat praktis yaitu: 1) Bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada guru-guru dalam meuatkan pendidikan anti korupsi dilingkungan sekolah maupun luar sekolah serta meningkatkan profesionalitasnya dalam membentuk karakter peserta didik; 2) Bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak sekolah dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam mencegah perilaku koruptif peserta didik utamanya melalui literasi anti korupsi di sekolah.; 3) Bagi dinas pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan mengevaluasi dan perbaikan kebijakan mengenai implementasi pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang” ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi, menganalisis peran sekolah dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi, dan menganalisis dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi terhadap sikap peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang.

Lokasi penelitian di SMP Negeri 12 Semarang. Data dan sumber data yaitu; Sumber data primer kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru PPKn, dan peserta didik yang mengikuti kegiatan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi.; Sumber data sekunder pada data-data yang memiliki hubungan dengan sekolah dan sumber lain seperti buku, jurnal, dkrripsi, artikel lain yang mendukung.

Alat dan teknik pengumpulan data penelitian ini

yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber pada pedoman penelitian. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode merupakan suatu cara membandingkan data hasil penelitian dengan data wawancara dan membandingkan data observasi. Triangulasi sumber digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru PPKn, dan siswa SMP Negeri 12 Semarang. Triangulasi sumber digunakan untuk mengkonfirmasi sumber informasi yang diperoleh dari informan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Pritandahari, 2017) yang mengatakan bahwa data sebaiknya diperoleh dari sumber yang berbeda dengan menggunakan cara yang sama. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu; pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penguatan pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang

Penguatan pendidikan anti korupsi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap individu atau masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif korupsi, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan melawan tindakan korupsi. Khususnya dalam penguatan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang, berfokus pada pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi, yakni upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep korupsi, dampak, nilai-nilai anti korupsi dan moral yang melandasi penolakan terhadap korupsi, serta strategi pencegahan yang dapat diimplementasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sekolah maupun bermasyarakat. SMP Negeri 12 Semarang mulai berfokus dalam menguatkan pendidikan anti korupsi pada tahun 2018. Tujuan utamanya yaitu membentuk dan mendidik para peserta didik agar dapat selalu bersikap baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi, dan mengenalkan berbagai contoh hal-hal kecil yang dapat menimbulkan tanda-tanda terjadinya korupsi dalam lingkup keluarga dan sekolah. Pelaksanaan

pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang lebih menitik beratkan pada praktek kejujuran dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat adaptif dan aplikatif. Pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu melalui pembelajaran dan pembiasaan literasi anti korupsi.

a. Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi

Salah satu bentuk penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang yaitu dengan adanya pembelajaran pendidikan anti korupsi (PAK). Pembelajaran pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang merupakan salah satu materi sisipan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan juga dalam pembelajaran karakter peserta didik setiap harinya yang dilaksanakan oleh seluruh guru. Alokasi waktu dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi ini kondisional dan menyesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan. Khususnya pada mata pelajaran PPKn.

Sebagai bukti adanya pembelajaran pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran, guru sering membawakan media pembelajaran khusus untuk praktik berbagai kegiatan yang mendukung terlaksananya pendidikan anti korupsi. Pembuatan materi pendidikan anti korupsi ini tergabung dalam modul ajar yang sudah disusun berdasarkan kajian materi yang akan disampaikan sesuai dengan bab dan sub bab materi, sehingga RPP guru PPKn satu dengan guru PPKn lain terkadang berbeda akan tetapi memiliki hasil luaran yang sama. Terkadang guru PPKn tidak menuliskan secara langsung pada RPP mengenai pendidikan anti korupsi. Hal ini karena guru atau pengajar dalam kelas tidak diwajibkan harus menyantumkan pendidikan anti korupsi, karena sejatinya pendidikan anti korupsi merupakan pembelajaran praktek yang dapat diimplementasikan secara langsung nilai-nilainya oleh peserta didik, sehingga pesertaa didik yang salah atau kurang benar dapat langsung diberikan arahan dan solusi yang baik oleh guru atau pengajar terkait. Utamanya disini pendidikan anti korupsi berperan sebagai nilai dalam perwujudan kegiatan

sehari-hari peserta didik.

Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi SMP Negeri 12 Semarang berdasarkan sering berkaitan dengan bab-bab mengenai bela negara dan juga mengenai kekuasaan negara. Dalam materi tersebut sering kali guru menyampaikan mengenai aspek korupsi yang dapat terjadi dalam lingkup bela negara dan kekuasaan negara. Sumber pembelajaran pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang bersumber pada buku modul jidil 1, 2, dan 3 yang sudah tersedia di perpustakaan yang diberikan oleh KPK. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn dalam menyampaikan materi yaitu berupa diskusi, ceramah, bercerita, debat, dan juga sosio drama yang dilaksanakan dilapangan sekolah secara bersama-sama. Disinilah guru PPKn membedah 9 nilai anti korupsi yang disesuaikan dengan kehidupan peserta didik dan juga materi pokok pembelajaran PPKn. Guru sebagai fasilitator memberikan rangsangan kepada peserta didik agar melatih tingkat keterampilan dan berpikir kritis dalam menanggapi permasalahan anti korupsi dalam masyarakat. Tak hanya metode Ibu Sri Untari, S.Pd selaku guru PPKn juga membuat media pembelajaran anti korupsi yang dinamakan PAAK (Petualangan Anak Anti Korupsi). PAAK digunakan untuk menstimulus peserta didik agar lebih semangat dan juga tertarik dalam belajar dengan sistem bermain, dengan permainan model boargame. Evaluasi pembelajaran anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang terintegrasi dan terakukulatif langsung kedalam raport peserta didik dalam bagian sikap dan juga penilaian oleh guru PPKn.

Sebagai komitmen sekolah dalam penguatan anti korupsi, sekolah membuat sebuah lorong yang dinamakan lorong integritas dimana didalam lorong tersebut berisikan berbagai alat peraga pembelajaran PPKn berupa buku modul anti korupsi, alat dan kostum pembiasaan literasi anti korupsi, mading-mading multi modal integritas, media pembelajaran anti korupsi, dan masih banyak lainnya. Disinilah sekolah mengimbau agar peserta didik senantiasa mengunjungi lorong tersebut untuk membaca berbagai literatur yang sudah disediakan sehingga nantinya dapat meningkatkan kesadaran, pola berpikir kritis, dan pengetahuan anti korupsi oleh

peserta didik.

b. Pembiasaan Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang

Semakin sering kegiatan pembiasaan dilakukan maka akan berpengaruh pada kuatnya sikap dan perilaku pada peserta didik. Bentuk pembiasaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang yaitu terdapat Selasa Integritas, Orange Jus, Diary Kejujuran, Seminar Anti Korupsi, dan Majalah Cemara.

1) Selasa Integritas

Selasa integritas merupakan pembiasaan sosio drama yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 12 Semarang sebagai bentuk dari pengimplementasian sembilan nilai-nilai anti korupsi. Selasa Integritas adalah sebutan kegiatan pembiasaan anti korupsi yang selalu dilaksanakan pada hari selasa pagi pukul 07.00 – 07.25. Pembiasaan selasa integritas menjadi bagian rutin SMP Negeri 12 Semarang yang dilaksanakan pada hari selasa. Koordinator selasa integritas tidak lain adalah para guru PPKn dan juga memiliki tim khusus dalam pelaksanaanya, yaitu Ibu Sri Untari, S.Pd, Ibu Sri Hidayatun, S.Pd, dan Bapak Koharudin, S.Pd, dan tim peserta didik selasa integritas. Sosio drama anti korupsi yang dilaksanakan ini merupakan kerjasama guru PPKn dengan peserta didik dimana guru PPKn menyusun skenario yang bersumber pada buku modul anti korupsi, abita, atau orange jus, yang mana nantinya skenario tersebut diperankan oleh peserta didik tim integritas pada hari selasa pagi dilapangan sekolah dengan disaksikan oleh seluruh warga sekolah. Tema-tema sosio drama tersebut yaitu pada nilai-nilai anti korupsi, biografi pahlawan nasional, dan keadaan sosial dimasyarakat saat ini. Disinilah literasi berperan pada pemahaman peserta didik dalam memahami sebuah percakapan dalam skenario yang kemudian diaplikasikan pada sosio drama sehingga dapat memunculkan makna pada pelaksanaanya guru PPKn memberikan stimulus dan berbagai pertanyaan kepada peserta didik secara acak agar dapat mengetahui pemahaman konsep yang didapat setelah melaksanakan pembiasaan tersebut dan juga dapat membentuk sikap anti

korupsi melalui pengenalan konsep dan praktik.

2) *Orange Jus*

Orange Jus merupakan kelanjutan pembiasaan pendidikan anti korupsi dari pembiasaan selasa integritas. Orange jus adalah sebutan dari buku pendidikan anti korupsi yang ada di SMP Negeri 12 Semarang. Karena warna buku tersebut berwarna orange dan mirip dengan warna jus jeruk maka dinamakannya *orange jus*. Lahirnya pembiasaan orange jus merupakan bentuk inisiatif dari kegiatan pembiasaan selasa integritas. *Orange jus* pula berdiri bersama dengan selasa integritas yaitu pada tahun 2018. Pelaksanaan pembiasaan orang jus ini menyesuaikan dengan kegiatan selasa integritas dan yang pastinya dilaksanakan dalam kelas. *Orange jus* biasa dilaksanakan jika kondisi lapangan sekolah basah atau tengah hujan yang tidak memungkinkan para peserta didik berkumpul dilapangan sekolah. Sebagai bentuk konsistensi SMP Negeri 12 Semarang dalam menguatkan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi maka tidak ada halangan untuk terus melanjutkan pembiasaan selagi dapat dilakukan dalam kondisi apapun selama tidak dalam kondisi pelaksanaan ujian sekolah. *Orange jus* di koordinatori oleh para guru PPKn dan juga tim integritas dengan memanggil ketua kelas masing-masing atau langsung menyuruh ketua kelas untuk mengambil buku *orange jus* atau buku anti korupsi yang sudah tersedia diperpustakaan sekolah. Semua kelas tanpa terkecuali mengambil satu buku anti korupsi yang nantinya dibacakan didepan kelas masing-masing peserta didik. Pola pemanduan pelaksanaan *orange jus* biasanya langsung dilaksanakan oleh ketua kelas secara langsung membacakan salah satu tema dalam buku anti korupsi tersebut kepada teman-temannya dan teman lainnya mendengarkan dan menyimak apa yang dibacakan oleh ketua kelas tersebut. Sering juga pola pemanduan pelaksanaan orang jus dilakukan oleh guru pada jam pertama dikelas tersebut. Guru tersebut membimbing para pesertaa didik untuk hikmat memahami tema anti korupsi yang dibacakan oleh salah satu rekan temannya didepan hingga selesai. Setelah pembacaan salah satu tema anti korupsi tersebut guru jam pertama memberikan refleksi atas tema yang baru dibacakan dan beberapa

kali menjadikan bahan refleksi tersebut sebagai tanya jawab sebelum memulai pembelajaran atau juga dapat dijadikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik.

3) *Diary Kejujuran*

Diary kejujuran merupakan bentuk pembiasaan anti korupsi yaitu dengan penulisan berbagai barang temuan pada buku khusus untuk mencatat berbagai barang yang ditemukan tanpa ada pemiliknya. Pembiasaan *diary kejujuran* ini pada mulanya belum dibentuk secara khusus, semua barang temuan sebelumnya hanya dilaporkan kepada pihak guru saja tanpa adanya perekapan dan juga pendataan secara komplit berbagai barang temuan yang ditemukan pada tanggal berapa, jam berapa, dan dimana barang tersebut ditemukan. Sehingga terkadang barang yang sudah lama tidak ada pemiliknya maka akan hilang identitasnya dan tidak akan menemukan siapa pemiliknya. Pada tahun 2018 Ibu Sri Untari, S.Pd selaku koordinator pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang mulai membenahi mekanisme pelaksanaan berbagai barang temuan tersebut agar lebih tersusun dengan rapi dan juga jelas asal-usul barang tersebut dan untuk apa kedepannya jika semua barang temua dan uang temuan tersebut tidak menemukan pemiliknya. *Diary kejujuran* merupakan bentuk pembiasaan anti korupsi yang mengimplementasikan nilai anti korupsi yaitu kejujuran. Kejujuran peserta didik dilatih secara disiplin dengan buku catatan temua ini. Pada pembiasaan diary kejujuran ini awalnya peserta didik yang menemukan barang atau uang langsung melaporkanya kepada guru yang nantinya akan disampaikan kepada Ibu Untari, S.Pd selaku koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang. Waktu berlalu berganti tahun hingga saat ini para peserta didik yang awalnya malu untuk melaporkan barang temuannya, kini mulai terbiasa berani melaporkannya secara langsung kepada Ibu Untari, S.Pd atau mencatat sendiri barang temuannya tersebut, mulai dari apa nama barang temuan, kapan waktu menemukan, dimana barang ditemukan, dan tanda tangan penemu barang tersebut. Disinilah peran diary kejujuran sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang dengan

meningkatnya kejujuran peserta didik dengan berbagai barang temuannya. Sehingga dapat dikatakan oleh guru PPKn bahwa penguatan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang berhasil.

4) Seminar Anti Korupsi

Seminar anti korupsi merupakan bentuk kegiatan tahunan yang diadakan oleh SMP Negeri 1 Semarang yang biasanya diadakan pada masa MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) atau adanya tamu dari pihak luar yang hendak mengadakan kegiatan seminar anti korupsi yang berlokasi di SMP Negeri 12 Semarang. Dalam seminar anti korupsi anak-anak diberikan berbagai wawasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan jujur sebagai peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang. Mulai dari menaati berbagai peraturan sekolah yang sudah dibuat, peraturan lalu lintas, hingga peraturan mengenai undang-undang teknologi masa kini. Fokus tema pembahasan menyesuaikan dengan topik yang tengah terjadi pada dunia pendidikan saat ini sehingga bersifat kondisional dan tidak selalu membahas tentang kegiatan-kegiatan yang mengarah pada korupsi akan tetapi lebih kepada himbauan-himbauan dalam membangun nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan peserta didik.

5) Majalah Cemara

Majalah cemara merupakan bentuk luaran dari ekstrakurikuler jurnalistik yang ada di SMP Negeri 12 Semarang. Majalah cemara sebagai bentuk pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi yaitu isi dari majalah cemara sering menuliskan berbagai bentuk atau karakter-karakter baik yang secara tidak langsung dapat membangun nilai-nilai anti korupsi. Majalah cemara dicetak setiap semester dengan tema-tema majalah yang berbeda setiap kali mencetak. Dalam majalah cemara anak-anak dilatih untuk berani, karena 90% isi dari majalah cemara merupakan karya peserta didik dan hanya bagian *layout* atau penataan gambar dan tulisan agar pas dan rapi. Literasi anti korupsi yang mendukung dalam pemahaman konsep-konsep nilai-nilai anti korupsi relevan dengan luaran berupa bacaan-bacaan inspiratif yang diraih oleh warga sekolah SMP Negeri 12 Semarang yang mana mendukung untuk memotivasi peserta didik untuk semangat menempuh pendidikan dan belajar

disekolah. Adanya majalah cemara sebagai bentuk bahwa SMP Negeri 12 Semarang peduli terhadap perkembangan literasi peserta didik sejak tahun 2016. Utamanya dalam majalah cemara melatih peserta didik untuk berani berkarya dan berani untuk memberikan sarana edukasi yang baik kepada teman-teman. Majalah-majalah yang sudah buat nantinya akan ditaruh pada perpustakaan sekolah dan dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai kemajuan literasi peserta didik dari semester ke semester berikutnya. Bagaimana telaah pesera didik dalam memahami sebuah konsep dan merangkai berbagai kalimat menjadi sebuah artikel yang menarik untuk dibaca. Dengan adanya majalah cemara, peserta didik diajak untuk ikut terlibat aktif dalam perkembangan literasi di SMP Negeri 12 Semarang. Sebagai bentuk implementasi literasi dan menjadi salah satu bentuk literasi anti korupsi, berbagai nilai-nilai anti korupsi menjadi bagian besar dalam penulisan artikel. Seperti menulis artikel yang meningkatkan motivasi peserta didik dalam peduli terhadap prestasi, peduli terhadap pendidikan, peduli untuk diri sendiri agar terus berkembang, dan berani untuk terbuka dalam menyediakan ruang diskusi kepada peserta didik lain agar ikut serta dalam meningkatkan literasi anti korupsi dan senantiasa berpikir kritis. Oleh karena itu majalah cemara sangat mendukung literasi anti korupsi, sebab dalam penyampaian pesan antar peserta didik lebih dapat dipahami dengan mudah. Sehingga konsep-konsep anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dapat memotivasi peserta didik untuk berani dalam mengambil langkah baru dalam hidupnya.

Peran Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang

Dalam penelitian ini berfokus pada tiga peran yaitu peran kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan guru PPKn dalam penguatan literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang.

a) Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah kunci dari pelaksanaan arah kebijakan sekolah di SMP Negeri 12 Semarang. Sebagai kepala sekolah Bapak Drs. Slamet, M.Pd harus bijaksana dalam menentukan berbagai kebijakan yang dapat memberikan

kenyamanan dalam terlaksananya proses belajar mengajar serta administrasi di SMP Negeri 12 Semarang. Dengan adanya kepala sekolah yang bijak dalam menentukan arah tujuannya maka sekolah akan memiliki citra dan lulusan yang berkopenten. Pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi merupakan salah satu pendidikan nilai dengan tujuan mencetak para generasi muda agar senantiasa memiliki perilaku dan sikap yang anti koruptif. Sekolah sebagai tempat dalam membentuk karakter, tentunya kepala sekolah sangat mendukung akan terlaksananya pendidikan anti korupsi. Peran kepala sekolah dalam penguatan literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang yaitu: 1) Pengembangan kebijakan anti korupsi sekolah; 2) Memimpin penguatan pendidikan anti korupsi; 3) Menjadi teladan anti korupsi terhadap guru dan peserta didik; 4) Memfasilitasi guru dan peserta didik dalam kegiatan pendidikan anti korupsi; 5) Kolaborasi dengan lembaga atau pihak dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi; 6) Evaluasi dan pemantauan program pendidikan anti korupsi; 7) Kampanye anti korupsi dan menciptakan lingkungan bersih.

b) Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dalam Penguatan Pendidikan Anti Korupsi

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan memiliki peran penting dalam implementasi penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang. Pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik untuk dapat memiliki integritas, moralitas, dan sikap anti koruptif. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan memiliki peranan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi program-program kesiswaan yang diadakan di SMP Negeri 12 Semarang. Utamanya yaitu program-program yang berkaitan dengan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi. Peran wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam pendidikan anti korupsi yaitu sebagai berikut: 1) Koordinasi program literasi anti korupsi dengan guru PPKn; 2) Pengembangan pemantauan literasi anti korupsi; 3) Pembinaan sikap dan etika peserta didik; 4) Mendukung kegiatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi.

c) Peran Guru PPKn dalam Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn merupakan guru yang memiliki kepakarakan ahli dalam bidang sosial Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam pendidikan yang bersangkutan dengan kasus korupsi, tentu menjadi bidang guru PPKn dalam studi kewarganegaraan dan ketatanegaraan. Guru PPKn sebagai koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi mempunyai peran andil yang sangat penting dalam menentukan materi dalam pelaksanaan pembelajaran dan pembiasaan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang. Guru PPKn di SMP Negeri 12 Semarang terdapat tiga orang yaitu; Ibu Sri Untari, S.Pd; Ibu Sri Hidayatun, S.Pd, dan Bapak Koharudin, S.Pd. Oleh kepala sekolah SMP Negeri 12 Semarang, guru PPKn ditunjuk secara langsung dengan surat keputusan kepala sekolah sebagai koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang. Sehingga segala sesuatu kegiatan yang berurusan atau bersangkutan dengan pendidikan anti korupsi akan diarahkan kepada beliau-beliau selaku koordinir kegiatan pendidikan anti korupsi. Berikut merupakan peran guru PPKn dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang: 1) Koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi; 2) Integrasi literasi anti korupsi dalam pembelajaran; 3) Penanaman kesadaran sosial pada peserta didik; 4) Stimulation pemikiran kritis terhadap isu korupsi; 5) Pengembangan media edukasi literasi anti korupsi; 6) Evaluasi penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi.

Dampak Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi Terhadap Peserta Didik di SMP Negeri 12 Semarang

Peserta didik sebagai sasaran dalam pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi. Sebagai sasaran utama, tentunya para guru dan pimpinan sekolah dalam memberikan penguatan sudah mempersiapkannya dengan baik dan matang sehingga tidak hanya dilaksanakan saja, akan tetapi

kebermanfaatan dari kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh peserta didik dan dapat diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang secara khusus dimulai pada tahun 2018 tentunya memiliki dampak-dampak positif kepada peserta didik dalam pembentukan sikap. Dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang yaitu dengan berdampaknya pada sikap anti korupsi pada diri peserta didik. Sikap anti korupsi merupakan sikap mental, moralitas, dan etika peserta didik yang senantiasa menentang dan menolak berbagai bentuk korupsi yang ada. Sehingga dapat tercermin integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut hasil dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang yang ditemukan oleh peneliti: 1) Meningkatnya kepedulian dan kejujuran peserta didik; 2) Disiplin dan bertanggung jawab akan tugas yang diberikan; 3) Berani tampil, membela kebeneran, dan mengakui kesalahannya; 4) Mampu bersikap adil; 5) Meningkatnya sikap gotong royong dan kerja keras peserta didik.

Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi poin 7 Instruksi Khusus Diktum ke-11 menyatakan bahwa menteri pendidikan nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non-formal. Penguatan pendidikan anti korupsi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kedasaran, dan sikap individu atau masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif korupsi, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan melawan tindakan korupsi. Pendidikan anti-korupsi juga diartikan sebagai upaya yang diselenggarakan secara sadar dan terstruktur kepada peserta didik, dengan menyediakan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka bersedia dan memiliki kapabilitas untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan berkembangnya

korupsi (Handoyo: 2013: 43). Tujuan utamanya bukan hanya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, tetapi juga agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menolak segala pengaruh yang dapat mengarah pada perilaku korupsi (Handoyo: 2013: 43). Pada pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang telah mengaplikasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung terciptanya nilai dan sikap anti korupsi terhadap peserta didik. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang menekankan pada konsep-konsep pemahaman praktik dari implementasi nilai-nilai anti korupsi.

Perluanya penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi merupakan salah satu bentuk usaha mengatasi masalah korupsi sejak dulu dalam dunia pendidikan. Sebagai mana anak-anak akan menghabiskan waktunya pada pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya penguatan agar tercipta perilaku atau kegiatan yang diinginkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa penguatan adalah suatu stimulus, dorongan, atau rangsangan berupa benda atau pun kebijakan yang dikemas dalam peristiwa yang dimunculkan segera setelah perilaku melakukannya dan dapat meningkatkan keseringan munculnya perilaku tersebut (Djaramah: 2005). Perilaku atau keseringan yang diharapkan adalah perilaku yang mengarah pada sikap-sikap anti korupsi terhadap peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang. Sekolah memberikan kegiatan atau pembiasaan secara berulang-ulang agar peserta didik memiliki wawasan yang luas, utamanya dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi pada kehidupan sehari-hari peserta didik dengan mengedepankan keterampilan dan pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut melalui literasi peserta didik dapat belajar dan memahami dengan perlahan apa saja yang dimaknai anti korupsi. Literasi merupakan hasil kerja pemahaman perolehan melalui berbagai aktivitas seperti membaca menulis, dan melalukan kegiatan yang menjadikan pengetahuan dan hubungan sosial (Indiarto: 2017:12). Dengan pengembangan pengetahuan anti korupsi melalui literasi anti korupsi diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat meningkatkan pola berpikir kritis peserta didik terhadap berbagai permasalahan lingkungan sosial. Seperti halnya pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi karakter peserta

didik. Penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu dalam pembelajaran dan pembiasaan sekolah. Berikut analisis peneliti dalam pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang.

Sejalan dengan hal tersebut Suyanto (dalam Handoyo 2013: 47) menyebutkan bahwa bentuk pembelajaran pendidikan anti korupsi merupakan salah satu strategi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah. Strategi tersebut adalah strategi inklusif yaitu menyisipkan nilai-nilai anti korupsi kedalam sejumlah mata pelajaran terkait. Sebagaimana pembelajaran semestinya, guru PPKn dalam mengamplifikasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran yaitu dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran. Dengan guru menyediakan media pembelajaran anti korupsi serta modul-modul sebagai pendukung proses pembelajaran pendidikan anti korupsi yang tersedia diperpustakaan sekolah.

Noviani Achmad Putri (2023) menjelaskan setidaknya terdapat tiga bidang literasi yang efektif dalam mendukung penguatan anti korupsi. Literasi tersebut yaitu 1) Literasi Baca. Literasi baca adalah pengetahuan dan kemampuan membaca, menulis, meneliti, mengorganisasikan dan memahami, menganalisis, merespons, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan keterampilan, serta berpartisipasi dalam lingkungan. 2) Literasi Digital. Literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu untuk menyaring informasi secara akurat dari berbagai sumber. 3) Literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya adalah kemampuan memahami dan menghubungkan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Sedangkan literasi kewarganegaraan adalah kemampuan memahami hak dan kewajiban warga negara. Kapasitas budaya dan kewarganegaraan adalah kapasitas individu dan komunitas untuk mempengaruhi lingkungan sosial mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan budaya mereka. Berikut analisis penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang sesuai teori diatas.

1) Literasi baca. Literasi baca dalam rangka penguatan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang melaksanakan literasi baca

dengan sekolah sudah menyediakan berbagai bahan bacaan literatur anti korupsi secara lengkap seperti halnya pembiasaan orange jus yaitu membaca buku integritas yang membahas nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam biografi para tokoh pahlawan nasional pada setiap hari selasa, sejalan dengan hal tersebut sekolah sudah melaksanakan pembiasaan anti korupsi melalui pembuatan majalah cemara dimana peserta didik dituntut untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam merangkai kata dan membuat sebuah artikel. Disinilah literasi baca sudah teraplikasi dengan baik, baik dalam rangka baca ataupun menulis berbagai literasi yang bertemakan anti korupsi.

2) Literasi digital. Sebagai bentuk penyeimbangan dengan kemajuan zaman, pembelajaran pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang tentunya juga mengintegritasikan digitalisasi dalam proses pembelajarannya. Dalam proses belajar mengajar menurut Ibu Sri Hidayatun, S.Pd para peserta didik diajak untuk bersama sama untuk mencari kebenaran fakta dari sebagai sumber literatur. Sebab maraknya berita hoax dapat berdampak pada ketidak benaran akan sebuah berita dan dapat menyesatkan pembaca. Oleh karenanya SMP negeri 12 Semarang juga sudah memperbolehkan para peserta didiknya menggunakan smartphone dalam proses pembelajaran dengan pemantauan oleh wali kelas. Disinilah peserta didik mendapatkan berbagai sumber bacaan tambahan dalam mendukung proses pembelajaran agar tercipta suasana pembelajaran yang menarik dari berbagai arah dan sumber informasi.

3) Literasi budaya dan kewarganegaraan. Sejalan dengan hal tersebut, SMP Negeri 12 Semarang telah mengimplementasikan literasi budaya dan kewarganegaraan dalam rangka pendidikan anti korupsi. Dapat dibuktikan dengan pembiasaan-pembiasaan anti korupsi yang mengangkat nilai-nilai sosial budaya dan juga biografi para tokoh pahlawan nasional. Para proses pembelajaran anti korupsi, para peserta didik diberikan berbagai contoh nilai-nilai sosial yang baik yang ada dalam masyarakat, utamanya dalam kesehariannya para guru mengingatkan para peserta didik untuk senantiasa berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai anti korupsi seperti selalu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab jia diberikan sebuah tugas. Kemudian dalam pembiasaan selasa integritas, para peserta didik diajak untuk memahami sebuah konsep drama anti korupsi yang berasal dari cerita rakyat, permasalahan sosial, ataupun

nilai-nilai anti korupsi yang bersumber pada tokoh nasional yang mana skenario diaplikasikan kedalam sosio drama anti korupsi kepada seluruh warga sekolah pada setiap selasa pagi sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menguatkan pendidikan anti korupsi.

Peserta didik SMP Negeri 12 Semarang setelah diberikan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi kini menjadi lebih dapat memahami berbagai konsep-konsep anti korupsi baik pada kehidupan sehari-hari maupun yang berasal dari para tokoh nasional. Kemudian juga membentuk sikap yang disiplin, jujur, berani, terbuka, serta bertanggung jawab atas tugas yang berikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang, maka disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang terbagi menjadi dua yaitu dalam bentuk pembelajaran dan pembiasaan anti korupsi. Pembelajaran pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan menyisipkan materi anti korupsi pada tema besar pembelajaran dengan materi menyesuaikan dengan pokok bahasan dan mengambil sumber materi anti korupsi pada buku-buku modul pendidikan anti korupsi yang sudah tersedia diperpustakaan dan lorong integritas. Pembelajaran anti korupsi memiliki hambatan pada terbatasnya waktu dan tidak semua tema besar pembelajaran dapat disisipkan materi anti korupsi. Selain dalam pembelajaran, penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi juga dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan literasi anti korupsi seperti selasa integritas, *orange jus*, *diary* kejujuran, seminar anti korupsi, dan majalah cemara. Dari kegiatan pembelajaran dan pembiasaan anti korupsi tersebut peserta didik senantiasa diajak untuk membaca, menulis, memahami konsep, dan menyatakan pendapatnya. Sehingga berdampak pada pemahaman konsep implementasi nilai-nilai anti korupsi dan meningkatkan pola berpikir kritis peserta didik. Oleh karenanya kegiatan tersebut terus dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat meningkatkan literasi anti korupsi.
2. Peran sekolah dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang sangat penting. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru PPKn berperan dalam pelaksanaan dan menentukan kebijakan mengenai pendidikan anti korupsi utamanya melalui literasi anti korupsi. Peran kepala sekolah dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi a) Pengembangan kebijakan sekolah b) Memimpin penguatan pendidikan anti korupsi c) Menjadi teladan anti korupsi terhadap guru dan peserta didik d) Memfasilitasi guru dan peserta didik dalam kegiatan pendidikan anti korupsi e) kolaborasi lembaga atau pihak pelaksana pendidikan anti korupsi f) Evaluasi dan pemantauan program pendidikan anti korupsi g) Kampanye anti korupsi dan menciptakan lingkungan bersih. Peran wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi a) Koordinasi program literasi anti korupsi dengan guru PPKn b) Pengembangan pemantauan literasi anti korupsi c) Pembinaan sikap dan etika peserta didik d) Mendukung kegiatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi. Peran guru PPKn dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi a) Koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi b) Integrasi literasi anti korupsi dalam pembelajaran c) Penanaman kesadaran sosial pada peserta didik d) Stimulasi pemikiran kritis terhadap isu korupsi e) Pengembangan media edukasi literasi anti korupsi f) Evaluasi penguatan pendidikan anti korupsi.
3. Dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi pada sikap peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang menunjukkan perubahan sikap yang signifikan yaitu dengan meningkatnya sikap kepedulian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, berani, adil, gotong royong, dan kerja keras. Peserta didik mulai dapat mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan yang dirasakan oleh peserta didik utamanya setelah adanya penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi yaitu peserta didik dapat bersikap berani untuk tampil dan mengungkapkan

pemikiran kritisnya atas isu sosial kemudian telah jujur dalam berbagai barang temuan yang ditemukannya. Walaupun begitu masih terdapat satu atau dua anak yang terkadang belum bersikap sesuai dengan nilai anti korupsi karena permasalahan pribadinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang, Inpres, dan Peraturan-peraturan

- Pendidikan, I., Anti, K., Semarang, D. I. K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Semarang, W. (2019). (*PERWALI*) Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kota Semarang.
- Presiden RI. (2012). *Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.* 1–23.
- Rektor. (2022). *Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Panduan Tugas Akhir dan Publikasi Universitas Negeri Semarang.*
- Tinggi, S., & Islam, A. (2013). *KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 1696 TAHUN 2013 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH TAHUN 2013.*
- UU No.9 Tahun. (2018). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi

Buku

- Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks perilaku anti korupsi 2020. *Badan Pusat Statistik*, 8–149.
- Eko, M. (2012). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi* (Edisi Revi). Penerbit Ombak. <https://doi.org/DOK/15.BK.17578>
- Kemendikbud. (2016). *Desain Induk Literasi Sekolah*. 76.
- Kemendikbud dan KPK. (2012). Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan. *Kemendikbud*, 12(2), 189–207.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Cetakan ke). ALFABETA Bandung.

Skripsi dan Jurnal

- Andina, N. (2019). Implementation of Anti-Corruption Policy in Junior High School 10 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 148.
- Annur, C. M. (2023). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022. *Databoks*, 1.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>

- Effendi, T., Octarina, N. F., & Hardinanto, A. (2020). Anti-Corruption Education at Elementary Education as Primary Prevention of Corruptive Behavior: Study of Social Control Theory in Madura Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(08), 1395–1408. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I8/PR280153>
- Farischa Al Fidiah, U. (2020). Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan di MTs Tarbiyatut Thilabah Lamongan. In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://jurnal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Ependi, Z. (2019). *“Implementasi Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Tanah Datar.*
- Gandamana, A. (2018). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Habituasi Dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Siswa Di Smp Negeri 1 Cianjur. *School Education Journal Pgsd Fip Unimed*, 8(2), 159–171. <https://doi.org/10.24114/sejpgsd.v8i2.10197>
- Handoyo, E. (2021). Anti-Corruption Education at Universitas Negeri Semarang: What Benefits Can Students Get? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(6), 2672–2685. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.5768>
- Handoyo, E., Susanti, M. H., & Suhardiyanto, A. (2011). Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di SMA 6 Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 14(2), 25506.
- Kristina. (2021). *Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Karakter Tanggung Jawab Siswa di SMP Labschool UPI.*
- Kusnandar, V. B. (2022). ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada 2021. *Katadata Media Network*, 1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021>
- Miftakhul Jannah, S., & Satmoko Adi, A. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship di SMP Negeri X Kabupaten Lamongan. *Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z JCMS*, 8(1), 26–39.
- Mukodi. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Representatif dan Aplikatif di Sekolah*. LPPM Press.
- Mukodi, & Burhanuddin, A. (2013). Pendidikan Anti Korupsi Di Sma Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(1), 855–916. <http://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/jpp/art>

- icle/view/45/40
- Muridon, M. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910>
- Nugroho, A. (2022). *IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN NILAI ANTI KORUPSI PADA PERILAKU SISWA MELALUI MODEL CHARTA DALAM PEMBELAJARAN DARING (Studi Deskriptif Kelas 7 SMPN 1 Bandung) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan dalam Progr.*
- Prasetyowati, N. T., Sutoyo, & Supeni, S. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Rangka Penguatan Nilai Karakter Kejujuran pada Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 37–51.
- Putri, N. A., Handoyo, E., Martitah, M., & ... (2023). Penguatan Literasi Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPS. *Prosiding Seminar* ..., 561–569. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/2183%0Ahttps://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/2183/1666>
- Rahmawati, A. Y. (2020). *ositive Reinforcement*. July, 1–23.
- Revida, E. (2003). Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya. *USU Digital Library*, 1, 4–5.
- Rilo Pambudi, S., Rehendra Sucipta, P., & Syahputra, I. (2021). Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kegiatan Osis Di SMS Negeri 2 Kota Tanjungpinang. *Jurnal Karya Abdi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v2i1.1260>
- Rube'i, M. A., & Sari, D. (2019). Analisis Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas Vii Di Smp 02 Muhammadiyah Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 238. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1445>
- Sahid. (2015). Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Ahlak Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali Tahun Pelajaran 2014/2015. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 151, 10–17
- Sanyoto, A. P. (2018). Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Melalui Kegiatan Pembelajaran Outing Class Pendidikan Kewargenegaraan (Studi Pada Sekolah Menengah Tas Muhammadiyah 1 Karanganyar). *Universitas Sebelas Maret*, doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006
- Saputra, L. (2020, January 18). Melawan Korupsi dengan Literasi. *Garak*.
- Wahidin AK, M. (2018). Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran di SMA Negeri 18 Bulukumba. *Universitas Muhammadiyah Makasar*, 1, 430–439.
- Yelvita, F. S. (2022). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) BENGKULU*, 8.5.2017, 2003–2005.